



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR: LAP.700/ 163 /ITPROV-4/VI/2025

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Apareatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;
- 7) Keputusan Gubernur Nomor: 185/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2025 tentang Penetapan Penguatan dan Tanggung Jawab Tugas dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor B-000.1.2.3_57/S/ITPROV-4/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 untuk Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 dan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024;
- 8) Surat Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor: B-700_103/ST/ITPROV-1.3/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, penghiatisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* (PDCA) dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategi (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain:

1. Penilaian perencanaan kinerja atas ketersedian dokumen, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

1. Cheklis Pengumpulan Data dan Informasi

Teknis Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Teknis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.

3. Observasi

Teknis observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

Pelaksanaan penilaian menggunakan LKE (Lembar kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1	Perencanaan Kinerja	30%	20%	30%	50%	100
2	Pengukuran Kinerja	30%	20%	30%	50%	100
3	Pelaporan Kinerja	15%	20%	30%	50%	100
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20%	30%	50%	100
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100				

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel,berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

6. Dokumen Evaluasi

Dokumen-dokumen yang menggambarkan AKIP pada Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan;
- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 4) Perjanjian Kinerja Eselon II s/d Staf
- 5) Rencana Aksi;
- 6) Laporan Monev Renja Triwulan dan Evaluasi atas Rencana Aksi;
- 7) Pohon Kinerja;
- 8) Diagram Cascading;
- 9) Diagram Crosscutting;
- 10) Peraturan/SK/SOP dari Kepala Daerah atau OPD tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja;
- 11) Sertifikat/SPT penugasan mengikuti kegiatan sosialisasi/diklat Sakip
- 12) Daftar hadir rapat pengukuran capaian kinerja/monev renja
- 13) Jadwal/laporan/berita acara/notulensi/dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan
- 14) Laporan Kinerja (LKj) 2023;
- 15) Bukti pengiriman/penyerahan/tanda terima Lkj;
- 16) Bukti unggah LKj pada Website OPD, E-Sakip (<https://esr.menpan.go.id/>); dan
- 17) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun sebelumnya.

7. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi atas implementasi SAKIP Tahun 2024 diperoleh 8 (delapan) Perangkat Daerah predikat "A" (Memuaskan), 29 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah predikat BB (Sangat Baik) dan 6 (enam) Perangkat Daerah dengan predikat "B" (Baik) dengan rincian sebagai berikut:

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI 2025	PREDIKAT 2025	Keterangan
1	Inspektorat Provinsi Jambi	81,40	A	Memuaskan
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	81,25	A	Memuaskan
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	81,10	A	Memuaskan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	80,60	A	Memuaskan
5	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	80,50	A	Memuaskan
6	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	80,50	A	Memuaskan
7	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	80,35	A	Memuaskan
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	80,35	A	Memuaskan
9	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	79,35	BB	Sangat Baik
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	79,15	BB	Sangat Baik
11	Dinas P3A dan PP Provinsi Jambi	77,45	BB	Sangat Baik
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	77,00	BB	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi	76,70	BB	Sangat Baik

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI 2025	PREDIKAT 2025	Keterangan
14	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	75,85	BB	Sangat Baik
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi	75,25	BB	Sangat Baik
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	75,20	BB	Sangat Baik
17	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	75,05	BB	Sangat Baik
18	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	75,00	BB	Sangat Baik
19	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	74,90	BB	Sangat Baik
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	74,55	BB	Sangat Baik
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	74,25	BB	Sangat Baik
22	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	74,05	BB	Sangat Baik
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	74,00	BB	Sangat Baik
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	72,60	BB	Sangat Baik
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi	72,55	BB	Sangat Baik
26	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	72,30	BB	Sangat Baik
27	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi	72,25	BB	Sangat Baik
28	RSJ Daerah Provinsi Jambi	71,95	BB	Sangat Baik
29	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi	71,40	BB	Sangat Baik
30	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	71,35	BB	Sangat Baik
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	71,25	BB	Sangat Baik
32	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	70,90	BB	Sangat Baik
33	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	70,30	BB	Sangat Baik
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	70,15	BB	Sangat Baik
35	Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi	70,15	BB	Sangat Baik
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	70,15	BB	Sangat Baik
37	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	70,05	BB	Sangat Baik
38	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	69,60	B	Baik
39	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi	69,15	B	Baik
40	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	68,70	B	Baik
41	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi	66,50	B	Baik
42	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	65,05	B	Baik
43	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi	64,85	B	Baik

Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi dari hasil evaluasi seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian laporan hasil evaluasi Perangkat Daerah.

8. Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP dengan Tahun sebelumnya

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI 2025	PREDIKAT 2025	NILAI 2024	PREDIKAT 2024	NILAI 2023	PREDIKAT 2023	NILAI 2022	PREDIKAT 2022
1	Inspektorat Provinsi Jambi	81,40	A	81,70	A	81,20	A	78,48	BB
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	81,25	A	82,60	A	81,90	A	81,73	A
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	81,10	A	81,96	A	80,16	A	75,89	BB

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI 2025	PREDIKAT 2025	NILAI 2024	PREDIKAT 2024	NILAI 2023	PREDIKAT 2023	NILAI 2022	PREDIKAT 2022
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	80,60	A	81,50	A	80,90	A	80,41	A
5	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	80,50	A	80,15	A	77,26	BB	77,05	BB
6	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	80,50	A	72,95	BB	72,70	BB	66,90	B
7	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	80,35	A	80,26	A	78,75	BB	69,95	B
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	80,35	A	80,75	A	79,25	BB	68,46	B
9	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	79,35	BB	78,81	BB	77,00	BB	77,93	BB
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	79,15	BB	77,60	BB	77,20	BB	75,76	BB
11	Dinas P3A dan PP Provinsi Jambi	77,45	BB	76,25	BB	74,15	BB	65,16	B
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	77,00	BB	72,00	BB	71,70	BB	63,81	B
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi	76,70	BB	70,60	BB	66,01	B	65,38	B
14	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	75,85	BB	72,71	BB	71,46	BB	57,33	CC
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi	75,25	BB	74,05	BB	73,31	BB	73,40	BB
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	75,20	BB	72,95	BB	70,91	BB	66,57	B
17	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	75,05	BB	74,25	BB	74,05	BB	56,07	CC
18	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	75,00	BB	74,90	BB	74,85	BB	70,15	BB
19	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	74,90	BB	74,66	BB	74,20	BB	77,83	BB
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	74,55	BB	71,20	BB	70,40	BB	67,05	B
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	74,25	BB	73,65	BB	73,10	BB	68,93	B
22	Badan Penghubung Daerah Provinsi Provinsi Jambi	74,05	BB	70,40	BB	75,06	BB	64,39	B
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	74,00	BB	70,15	BB	62,11	B	63,49	B
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	72,60	BB	71,75	BB	70,26	BB	70,97	BB
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi	72,55	BB	70,25	BB	67,05	B	69,73	B
26	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	72,30	BB	65,70	B	64,36	B	69,69	B
27	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi	71,25	BB	71,01	BB	70,31	BB	69,72	B
28	RSJ Daerah Provinsi Jambi	71,95	BB	70,80	BB	69,15	B	67,25	B
29	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi	71,40	BB	72,40	BB	71,05	BB	68,81	B

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI 2025	PREDIKAT 2025	NILAI 2024	PREDIKAT 2024	NILAI 2023	PREDIKAT 2023	NILAI 2022	PREDIKAT 2022
30	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	71,35	BB	67,30	B	71,05	BB	62,78	B
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	71,25	BB	70,15	BB	68,00	B	59,05	CC
32	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	70,90	BB	70,60	BB	69,05	B	67,60	B
33	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	70,30	BB	70,45	BB	67,91	B	67,74	B
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	70,15	BB	70,60	BB	69,45	B	60,28	B
35	Biro Perekonomician dan SDA Setda Provinsi Jambi	70,15	BB	70,75	BB	70,60	BB	77,70	BB
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	70,15	BB	70,60	BB	67,68	B	65,88	B
37	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	70,05	BB	74,11	BB	67,27	B	tidak dapat dinilai	
38	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	69,60	B	65,15	B	69,56	B	68,83	B
39	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi	69,15	B	67,06	B	70,01	BB	63,76	B
40	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	68,70	B	70,20	BB	69,10	B	61,52	B
41	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi	66,50	B	60,55	B	68,76	B	51,86	B
42	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	65,05	B	63,10	B	61,51	B	68,47	B
43	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi	64,85	B	67,65	B	66,35	B	69,85	B

9. REKOMENDASI

1. Sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor: 185/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2025 tentang Penetapan Penguatan dan Tanggung Jawab Tugas dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi direkomendasikan kepada:
 - 1) Bappeda Provinsi Jambi mengoordinasikan dan melakukan pendampingan dalam penyelarasan dokumen perencanaan kinerja seluruh Perangkat Daerah seperti Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja berjenjang, *Critical Success Factor* (CSF), pohon kinerja, cascading kinerja, crosscutting kinerja, dan rencana aksi kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi melakukan reviu terhadap seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun guna memastikan kualitas laporan kinerja memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pimpinan Perangkat Daerah harus meningkatkan jumlah dan kualitas personil di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan atau yang membidangi SAKIP di Perangkat Daerah yang dipimpin.

3. Pimpinan Perangkat Daerah harus berkomitmen dan berperan aktif dalam mengimplementasikan SAKIP kepada unit pelaksana di Perangkat Daerah yang dipimpin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi beserta jajaran dalam implementasi SAKIP yang baik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jambi, 30 Juni 2025

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690819 199703 1 004